



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NASRUL ABIT**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **2536**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/35 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah Seluas 2725 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/133 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/200 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m2/133 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 4914 m2/133 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 320.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.000.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 132.771.125**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 8.466.771.125

III. HUTANG Rp. 155.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

8.311.771.125

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.